



RENCANA KERJA

2024

DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN LUWU



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Tahun Anggaran 2024 beserta Sumber Dana Indikatif, Indikator dan Evaluasi Kegiatan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu serta tolak ukur dalam merealisasikan Rencana Kerja yang direncanakan. Selain itu juga dapat membuka informasi tentang Rencana Kerja Kegiatan Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2024 dan sekaligus menilai dan mengukur keberhasilan dan kegagalan yang telah dilakukan pada setiap tahun anggaran.

Kepala Dinas Koperasi, UKM

& Perindustrian Kab. Luwu

RAHIMULLAH, S E

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip:19660710199303 1 003

DAFTAR
ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
.....	
i	Daftar Isi
.....	
	ii BAB I
PENDAHULUAN.....	
1	
1.1 Latar Belakang	
1	
1.2 Landasan Hukum	
2	
1.3 Maksud dan Tujuan	
4	
1.4 Sistematika Penulisan	
5	
BAB II Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	
.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
Tabel TC. 29	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
Tabel TC. 30	19
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKUP.....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
Tabel TC. 31	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
Tabel TC.32	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
.....	28

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran.....	28
3.3 Program dan Kegiatan.....	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
Table TC. 33	35
BAB V PENUTUP	44

BAB

I

PENDAHULUA

N

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD).

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RenjaPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Renja PD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan berpedoman pada Rencana Strategis PD.

Keberadaan Rancangan Rencana Kerja diharapkan menjadikan Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu memiliki arah dan tujuan organisasi yang jelas. Hal ini mengingat bahwa Renja merupakan penjabaran dari Renstra yang dijabarkan dalam bentuk Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas. Perencanaan yang sistematis tersebut secara langsung akan mampu memandu antar Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu supaya dapat bertindak konsisten terhadap apa yang telah dituangkan dalam dokumen Renstranya.

Disamping itu, Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu yang disingkat Dinas Koperin atau DKUP sebagai salah satu unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan

untuk pembinaan dan pengembangan sektor Koperasi, Sektor Usaha Kecil dan Menengah, dan sektor Industri. Rencana tahunan ini bersifat dinamis dan berkesinambungan memuat program dan kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Koperin atau DKUP serta mengakomodir dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang diusulkan melalui Forum SKPD dan Musrembang yang dilaksanakan secara berjenjang, serta program dan kegiatan yang bersifat *by design* yang disusun berdasarkan kebijakan pembangunan Sektor Koperasi, Sektor UKM dan Sektor Industri.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar rujukan legalitas dalam rangka penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu Tahun 2024 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dimutahirkan dengan Ketetapan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 1 Tahun 2011 tentang Rencana

Pemangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016
tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-
2024;

12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Kedudukan Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu;

13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
15. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target dan pencapaian yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun Anggaran;
2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatan;
3. Menetapkan program dan sasaran kerja yang terarah, terukur yang akan dijadikan pedoman pada masa satu tahun mendatang; dan
4. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian

Kabupaten Luwu Tahun 2024 adalah:

- 1 Menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun Anggaran;
- 2 Mendorong dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian antar bidang dan tingkat pemerintahan dalam pengelolaan Koperasi, UKM dan Perindustrian ;

- 3 Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan terhadap alokasi sumber daya dalam pembangunan / Pengembangan Koperasi, UKM dan Perindustrian
- 4 Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD dengan Renja K/L dan Renja Propinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu, dengan format tabel T – C.29.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisa pencapaian kinerja Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format tabel T - C.30

2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana kinerja pelayanan Perangkat Daerah
dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- c. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi
kepada Daerah terhadap capaian program nasional
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Perangkat Daerah

- e. Formulasi isu-isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian tentang :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilakukan
- d. Melampirkan Tabel T – C.31

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T – C.33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu tahun 2024 serta prakiraan maju tahun anggaran 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan juga memuat kaidah pelaksanaan renja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu tahun anggaran 2024.

BAB
II
PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat daerah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan sekaligus kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2019 s/d 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2023, mengingat Renja Tahun 2024 ini adalah Tahun Ke Lima pelaksanaan Renstra periode Tahun 2019 s/d 2024, sehingga yang dievaluasi dalam Renja Tahun Anggaran 2024 ini adalah Renstra Periode 2019 s/d 2024. Secara umum Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada hasil evaluasi rencana kerja. Evaluasi Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian dilakukan melalui pengukuran kinerja kegiatan dan program yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2024

Kabupaten Luwu

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 - 2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2021 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 (n-1)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
2	3	4		5		6		7		8 = 7/6		9		10 = 5+7+9		11 = 10 / 4	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			17.573.932.849		3.045.068.091		4.371.345.793		4.267.421.638		97,62		4.703.863.441		12.016.353.170		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		400	16.171.682.899	100	2.724.291.841	100	3.781.302.893	100	3.680.355.380	100	97,33	100	3.753.863.941	300	10.158.511.162	75,00%	62,82%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	400	13.998.947.199	100	2.586.396.391	100	2.981.303.893	100	2.880.564.980	100	96,62	100	3.248.493.991	300	8.715.455.362	75,00%	62,26%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu	400	38.350.300	100	4.362.100	100	5.479.100	100	5.479.100	100	100	100	17.624.050	300	27.465.250	75,00%	71,62%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	8	9.822.100	2	2.322.100	2	930.000	2	930.000	100	100						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	4	7.540.000	4	2.040.000	1	875.200	1	875.200	100	100						
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	4	4.500.000			1	875.200	1	875.200	100	100						
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	4	4.500.000			1	875.200	1	875.200	100	100						



Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	4	5.500.000			1	875.200	1	875.200	100	100						
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	10	6.488.200			5	1.048.300	5	1.048.300	100	100						
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	400	9.659.287.439	100	1.873.480.089	100	2.013.966.065	100	1.971.655.347	100	97,90	100	2.405.291.600	300	6.250.427.036	75,00%	64,71%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	1200	9.237.784.639	22	1.865.262.889	23	1.881.237.265	23	1.848.251.547	100,00	98,25						
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	60	397.530.000			15	122.700.000	15	113.940.000	100,00	92,86						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	4	13.258.600	1	2.759.600	1	2.122.000	1	1.582.000	100,00	74,55						
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	56	10.714.200	14	5.457.600	14	7.906.800	14	7.881.800	100,00	99,68						
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahAdministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada SKPD	300	8.419.400			100	2.499.600	100	1.599.600	100	63,99	100	1.730.000	200	3.329.600	66,67%	39,55%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3	8.419.400			1	2.499.600	1	1.599.600	100,00	63,99						
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	400	60.000.000				-		-			100	49.920.000	100	49.920.000	25,00%	83,20%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	60.000.000				0,00		0,00		0						
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi Umum	400	1.381.327.860	100	244.168.230	100	394.020.100	100	388.288.854	100	98,55	100	303.950.365	300	936.407.449	75,00%	67,79%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	29.997.000								0,00						





Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	24	100.000.000							0,00							
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	83	91.004.360	19	18.002.780	19	31.550.510	19	31.524.045	100,00	99,92						
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan yang disediakan	32	37.454.900	7	7.439.600	7	10.704.000	7	10.703.280	100,00	99,99						
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	12	147.000.000	2	17.945.000	2	14.400.000	2	14.100.000	100,00	97,92						
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	175	93.590.900	41	21.598.200	66	29.374.590	66	29.364.390	100,00	99,97						
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	40	97.860.000	10	22.965.000	10	30.050.000	10	26.450.000	100,00	88,02						
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	468	784.420.700	86	156.217.650	121	277.941.000	121	276.147.139	100,00	99,35						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	400	250.000.000			100	23.500.000	100	23.290.000	100	99,11	100	51.305.000	200	74.595.000	50,00%	29,84%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	20	250.000.000			5	23.500.000	5	23.290.000	100,00	99,11						
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan	400	1.945.486.600	100	399.710.631	100	374.400.000	100	326.971.919	100	87,33	100	362.492.976	300	1.089.175.526	75,00%	55,98%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	800	74.000.000	200	2.000.000	200	12.000.000	200	12.000.000	100	100,00						
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	48	189.600.000	12	94.413.631	12	74.400.000	12	37.471.919	100	50,37						
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	2549	1.681.886.600	909	303.297.000	444	288.000.000	438	277.500.000	98,65	96,35						
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	400	656.075.600	100	64.675.341	100	167.439.028	100	163.280.160	100	97,52	100	56.180.000	300	284.135.501	75,00%	43,31%





[illegible]



Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten yang diberikan penghargaan	15	100.980.500														
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan	300	159.976.000	100	26.988.350	100	50.000.000	100	49.886.400	100,00	99,77	100	241.753.500	300	318.628.250	100,00%	199,17 %
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten	300	159.976.000	100	26.988.350	100	50.000.000	100	49.886.400	100	99,77	100	241.753.500	300	318.628.250	100,00%	199,17 %
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kompetensinya	120	159.976.000	100%	26.988.350	40	50.000.000	40	49.886.400	100,00	99,77						
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang telah dilakukan pemberdayaan dan perlindungan	100	720.000.000			100	699.999.000	100	699.999.000	100,00	100,00			100	699.999.000	100,00%	97,22%
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten	100	720.000.000			100	699.999.000	100	699.999.000	100,00	100,00			100	699.999.000	100,00%	97,22%
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten	Jumlah koperasi yang difasilitasi dalam Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi					1	699.999.000	1	699.999.000	100,00	100,00						
PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang aktif	400	544.883.900	90,13	106.294.600	100	50.000.000	100	49.905.000	100	99,81	100	263.616.450	290,13	419.816.050	72,53%	77,05%





Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro	400	544.883.900	100	106.294.600	100	50.000.000	100	49.905.000	100	99,81	100	263.616.450	300	419.816.050	75,00%	77,05%
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah dokumen data potensi dan pengembangan usaha mikro	4	67.078.100	1	9.328.800												
Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	pelaksanaan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	3	100.000.000														
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam kemudahan perizinan		30.000.000														
Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah peserta Pelatihan dan meningkatnya Kualitas SDM Bagi Pelaku UMKM	190	347.805.800	100	96.965.800	30	50.000.000	30	49.905.000	100,00	99,81						
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	100	160.000.000				-		-					0	-	0,00%	0,00%
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah usaha mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	20	160.000.000											0	-	0,00%	0,00%
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha mikro yang difasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	20	160.000.000														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.402.249.950		320.776.250		590.042.900		587.066.258				949.999.500				





PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan penyelenggaraan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	400	1.295.979.950	100	316.776.250	100	590.042.900	100	587.066.258	100	99,50	100	929.713.200	300	1.833.555.708	75,00%	141,48 %
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	4	1.295.979.950	1	316.776.250	1	590.042.900	1	587.066.258	100	99,50	1	929.713.200	3	1.833.555.708	75,00%	141,48 %
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi	8	892.000.000	2	179.079.950	3	540.042.900	3	538.532.258	100,00	99,72						
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	90	383.879.950	30	137.696.300	2	50.000.000	2	48.534.000	100,00	97,07						
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi	2	20.100.000														
PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN	Cakupan penyelenggaraan penerbitan IUI Kecil dan IUI Menengah	100	46.270.000	100	4.000.000									100	4.000.000	100,00%	8,64%
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	4	46.270.000	1	4.000.000									1	4.000.000	25,00%	8,64%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pengamanan dan penyelamatan industri	212	46.270.000	22	4.000.000												
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	200	60.000.000									100	20.286.300	100	20.286.300	50,00%	33,81%





	Kewenangan Kabupaten																
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI. IPU. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2	60.000.000									1	20.286.300	1	20.286.300	50,00%	33,81%
KFasilitas pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen Informasi Industri (IUI,IPUI,IUKI dan IPKI)	2	20.000.000														
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah data informasi industri kabupaten yang dipublikasikan	2	20.000.000														
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2	20.000.000														

Belopa, Mei 2023

Kepala Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian

Kab. Luwu

R A H I M U L L A H, S E

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip:19660710199303 1 003

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang direncanakan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, total belanja Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kab. Luwu sebesar **Rp. 4.267.421.638,-**

Realisasi Belanja Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kab. Luwu Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 4.267.421.638,-** atau mencapai 97,62 % dari anggaran Belanja Tahun 2022 yaitu sebesar **Rp. 4.371.345.793,-**

Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian pada Tahun 2022 melaksanakan 5 (Lima) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2022 yang termuat dalam DPA Pokok maupun DPA Perubahan dan telah dimuat dalam Penetapan Kinerja Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan Perjanjian Target Kinerja Pimpinan Satuan Kerja yang akan dicapai Tahun 2022.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran capaian pelayanan kinerja Perangkat Daerah dapat dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja pada setiap indikator kinerja. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan di Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu sejauh ini untuk realisasi capaian kinerja hampir keseluruhan dapat terlaksana tetapi ada beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kurang matangnya pada perencanaan awal anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Untuk mengatasi hal – hal dimaksud dilakukan pembinaan dan membuat rencana aksi sekaligus time schedule dan rencana biaya tiap kegiatan.
2. Pendapatan asli daerah (PAD) dari segi retribusi tidak mencapai target yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi UPTD Industri pangan karena sesuatu hal.
3. Kurangnya etos kerja dan semangat kerja dari beberapa aparatur yang menyebabkan tidak selesainya target yang diharapkan.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja perangkat daerah, yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing, dengan format tabel T-C.30.

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kab.
Luwu

NO	INDIKATO	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Jumlah Koperasi Aktif			81	90	85	90	81	97	85	90	
2	Jumlah Seluruh Koperasi			450	459	465	474	450	461	465	474	
3	Persentase Koperasi Aktif			46.50	19.6	20	50	18.00	21.04	18.3	22	
4	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang			19.000	20.000	23.200	24.100	22.732	23.632	23.200	24.100	
5	Jumlah Seluruh UKM			25.000	26.000	27.000	27.500	25.221	26.121	26.000	26.500	
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil			36.77	37.69	38.63	39.90	90.13	90.47	92	94	
7	Jumlah Produk Asli Daerah Hasil UKM			18	23	25	30	18	18	25	39	
8	Pertumbuhan Industri			6.44	6.60	6.77	6.94	4.10	4.87	4.50	4.75	
9	Jumlah Kemasan Lokal Yang Tercipta				18	30	40	25	20	20	30	
10	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin			100	100	100	100	3.50		3.77	4.45	

2.3 Isu – isu Penting Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu.

Beberapa isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

- Memberikan Pengetahuan dengan sosialisasi tentang Undang- Undang Perkoperasian.
- Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi.
- Memberikan Fasilitas NIK dan Verifikasi Data.
- Memperbaiki Kapasitas dan Produktivitas usaha mikro dengan melakukan Pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM yang ada di daerah.
- Mendorong pengembangan industri unggulan daerah
- Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing
- Meningkatkan Kinerja dan Optimalisasi Fungsi IKM Industri Pangan Barambing

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2024, semua program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian yang ada dalam RKPD tersebut telah diakomodir dalam Renja 2023 . Namun karena keterbatasan anggaran yang ada maka ada beberapa kegiatan yang ada dalam Renja Tahun 2024 tidak diakomodir dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dan juga terdapat kemungkinan selisih rupiah dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tersebut. Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

T-C.31.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Luwu

RANCANGAN AWAL RKPD						ANALISIS KEBUTUHAN RENJA						
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.352.549.441	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					4.736.279.076
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.702.558.941	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					3.986.288.576
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	BB		3.197.188.991	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	BB		3.365.918.626
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	11	Dokumen	17.624.050	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	11	Dokumen	17.624.050
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	2.366.650	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun	2	dokumen	2.366.650
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	dokumen	1.973.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun	1	dokumen	1.973.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	dokumen	1.501.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	1	dokumen	1.501.200
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	dokumen	2.409.900	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1	dokumen	2.409.900
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	dokumen	2.132.650	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Belopa	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	1	dokumen	2.132.650
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5	dokumen	7.240.650	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Belopa	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun (LAKIP)	5	dokumen	7.240.650
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100	%	2.405.291.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	100	%	2.405.291.600
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	24	OB	2.262.485.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Luwu	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan	24	OB	2.262.485.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	15	Dokumen	132.300.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi	15	Dokumen	132.300.000



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan	4.690.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	laporan	4.690.400
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan	5.816.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Luwu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun	14	laporan	5.816.200
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	1	Dokumen	1.730.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	1	Dokumen	1.730.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	laporan	1.730.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Luwu	laporan hasil pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	laporan	1.730.000
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN dengan predikat kinerja baik		%	49.920.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN dengan predikat kinerja baik		%	67.420.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan		stell/ pasang	17.500.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kab. Luwu	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1	orang	49.920.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Luar Kab. Luwu	Jumlah ASN yang difasilitasi mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	1	orang	49.920.000
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	%	303.950.365	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Presentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	%	370.180.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang	8	jenis	780.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang	8	jenis	780.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	17	jenis	5.956.575	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	17	jenis	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	Jenis	4.512.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Luwu	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	Jenis	7.500.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	Surat	10.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Luwu	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan	2	Surat	14.400.000
	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	52	Jenis	12.556.790	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Luwu	Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan	52	Jenis	15.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis	7.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Luwu	Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan	3	jenis	12.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas Biasa	97	OK	261.844.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas Biasa	97	OK	300.000.000
		Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas dalam Kota	86	OK			Kab. Luwu	Jumlah perjalanan dinas dalam Kota	86	OK	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100	%	85.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		unit	35.000.000



	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan		jenis		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	3	jenis	50.000.000
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa		%	362.492.976	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa		%	362.492.976
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300	Surat	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Luwu	Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi	300	Surat	12.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan	31.892.976	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Luwu	Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik	12	bulan	31.892.976
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	444	OB	318.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Luwu	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	444	OB	318.600.000
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	56.180.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		%	56.180.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10	unit	51.640.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Luwu	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	10	unit	51.640.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	8	unit/set	4.540.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Luwu	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	8	unit/set	4.540.000
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					505.369.950	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					620.369.950
B	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Cakupan penyelenggaraan pengawasan		%	-	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		Cakupan penyelenggaraan pengawasan		%	35.000.000
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten		Cakupan penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah		%	-	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten		Cakupan penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah		%	35.000.000
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan		Laporan pelaksanaan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas		laporan		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan		Laporan pelaksanaan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	1	laporan	35.000.000
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten		Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten		laporan		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten		Laporan pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten		laporan	
C	PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP yang sehat		%		PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		Persentase KSP/USP yang sehat		%	35.000.000
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1		Cakupan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi		%		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1		Cakupan penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi		%	35.000.000

	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten		Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten		laporan		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten		Laporan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	1	laporan	35.000.000
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten		Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten yang diberikan penghargaan		KSP/USP		Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten		Jumlah KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten yang diberikan penghargaan		KSP/USP	
D	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase pengurus koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan	100	%	241.753.500	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		Persentase pengurus koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan	100	%	241.753.500
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten		Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten		%	241.753.500	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten		Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten		%	241.753.500
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Luwu	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kompetensinya	50	Orang	241.753.500	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab. Luwu	Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kompetensinya	50	Orang	241.753.500
E	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif		%	263.616.450	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif		%	308.616.450
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku		Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro		%	263.616.450	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku		Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro		%	308.616.450
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Luwu	Jumlah dokumen data potensi dan pengembangan usaha mikro		dokumen		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Luwu	Jumlah dokumen data potensi dan pengembangan usaha mikro	1	dokumen	45.000.000
	Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Luwu	Jumlah peserta Pelatihan dan meningkatnya Kualitas SDM Bagi Pelaku UMKM	50	orang	263.616.450	Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab. Luwu	Jumlah peserta Pelatihan dan meningkatnya Kualitas SDM Bagi Pelaku UMKM	50	orang	263.616.450
F	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Cakupan penyelenggaraan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		%	629.704.200	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Cakupan penyelenggaraan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		%	729.704.200
1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	1	dokumen	629.704.200	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten		Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	1	dokumen	729.704.200
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Luar Kab. Luwu	Jumlah Pameran Industri yang dilaksanakan	3	Pameran	499.990.450	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Luar Kab. Luwu	Jumlah Pameran Industri yang dilaksanakan	3	Pameran	499.990.450
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri		orang		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri		orang	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Luwu	Jumlah peserta Pelatihan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	30	Orang	129.713.750	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Luwu	Jumlah peserta Pelatihan pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	75	Orang	229.713.750
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah dokumen evaluasi		dokumen		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah dokumen evaluasi		dokumen	
G	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten	100	%	20.286.300	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	100	%	20.286.300
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten		Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi SINAS	1	laporan	20.286.300	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten		Laporan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi SINAS	1	laporan	20.286.300
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten melalui Sistem Informasi	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten / Kota	1	dokumen	20.286.300	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab. Luwu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta data lain Lingkup Kabupaten /	1	dokumen	20.286.300





2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusul pemangku kepentingan, bagi dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan Kepala Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari Penelitian Lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh,
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
3. Sajian tabel T-C.32 sebagai berikut :

TABEL T-C.

32

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2024
KABUPATEN LUWU**

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN				
	Revitalisasi Rumah Produksi Pengolahan Ikan	Kec. Suli	Meningkatkan Jumlah Produksi Ikan Olahan	1 Unit	Telah dimasukkan dalam Rencana Kerja 2024 tetapi karena anggaran yang terbatas maka untuk sementara depending (Tidak dimasukkan di RKA Tahun 2024)
	Pelatihan/magang desain kemasan produk IKM	Kab. Luwu	Meningkatnya Pemasaran Produk UMKM	1 Kali	Telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 tetapi karena anggaran yang terbatas maka untuk sementara depending (Tidak dimasukkan di RKA Tahun 2024)
2	PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA				
	Fasilitasi bantuan modal usaha bagi UMKM	Kab. Luwu	Meningkatnya status jenis Usaha	30 UMKM	Telah dimasukkan dalam Rencana Kerja 2024 tetapi karena anggaran yang terbatas maka untuk sementara depending

RENJA TAHUN 2024 DKUP KAB. LUWU

BAB

III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Lima program strategis Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan visi dari Presiden Joko Widodo untuk menjadikan UMKM yang jumlahnya mencapai 62 juta sebagai andalan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di tengah situasi perekonomian global yang kurang baik ini serta modernisasi koperasi.

Program unggulan pertama, memperbesar akses pasar baik didalam negeri maupun luar negeri, sehingga tercipta peluang dan permintaan terhadap produk-produk Koperasi dan UMKM dengan cara mendukung dan membantu penjualan secara online dan membuat regulasi agar perusahaan aplikasi dari luar negeri turut mempromosikan dan menjual produk koperasi dan UMKM.

Program unggulan kedua, peningkatan kualitas produksi dan inovasi untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan. Kita bantu menyediakan teknologi dan sarana pendukung, untuk memperbaiki kualitas dan kapasitas produksi yang bisa digunakan secara kolektif.

Program unggulan Ketiga menyangkut agregasi pembiayaan yang akan menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan Koperasi dan UMKM. Kemenkop dan

UKM sudah mengadakan pembicaraan dengan instansi dan lembaga terkait untuk mencari skema pembiayaan yang tepat, dengan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar, untuk menjadi off-taker produk UMKM danavalis untuk pembiayaan.

Program unggulan keempat, pengembangan kapasitas manajemen dan usaha Koperasi dan UKM. Diwujudkan antara lain melalui pemberian konsultasi, pelatihan dan pendampingan oleh para ahli, program ini diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk memasarkan produk ke luar negeri.

Program unggulan Kelima, memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha bagi Koperasi dan UMKM. Dengan langkah ini produk-produk lokal memiliki kesempatan yang sama untuk ditempatkan sejajar dengan produk-produk impor di mal-mal besar di Indonesia maupun negara sahabat.

Untuk mendukung Pembangunan Daerah dari Segi Koperasi UKM dan Perindustrian maka pemerintah daerah memberikan dukungan dengan melakukan langkah-langkah sbb :

- Memberikan Pengetahuan dengan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkoperasian.
- Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi.
- Memberikan Fasilitasi NIK dan Verifikasi Data.
- Memperbaiki Kapasitas dan Produktivitas usaha mikro dengan melakukan Pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM yang ada di daerah.
- Mendorong pengembangan industri unggulan daerah
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan IKM Industri Pangan Barambing
- Meningkatkan kualitas SDM pelaku usaha agar mampu menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Rencana Kerja Tahunan ini merupakan tahapan pelaksanaan Rencana Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian atau DKUP Kab. Luwu Tahun 2019 – 2024

yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrembang di tingkat Kecamatan dan di Tingkat Kabupaten serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kebijakan pemerintah Kabupaten khususnya berkaitan dengan sektor koperasi, UKM dan Industri dengan tujuan agar rencana kerja tahun 2024 memberikan gambaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai serta perkiraan dana yang dibutuhkan dari program dan kegiatan tersebut tidak lepas dari

Tujuan Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu yakni

Meningkatkan Perekonomian Daerah.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Luwu adalah Meningkatnya Kemandirian, Daya Saing dan produktivitas Koperasi, UMKM dan Industri Kecil Menengah yang akan dicapai dari Rencana Kerja yang diusulkan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Sasaran Bidang Kelembagaan dan Pengawasan
 - Meningkatnya kemampuan manajemen 20 unit Koperasi dengan Pembinaan, Pemantauan dan Pengembangan Koperasi di Kabupaten Luwu.
 - Memberikan Fasilitas Verifikasi dan Penomoran berupa NIK dan Data base untuk perkembangan dan kemajuan koperasi.
 - Terwujudnya koperasi berprestasi yang akan menjadi contoh dan menjadi utusan dalam pembinaan pemerintah baik itu pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat.
- 2) Sasaran Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro
 - meningkatnya Pertumbuhan UMKM yang aktif dan meningkatnya status Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi lebih baik

- Terfasilitasi Penumbuhan UMKM 30 kelompok
- Terfasilitasi kelompok UMKM untuk mendapatkan dana melalui program Pemerintah untuk penumbuhan wirausaha.

3) Sasaran Bidang Perindustrian

- Memaksimalkan Sentra IKM Barambing
- Meningkatnya akses pasar produk bagi produk IKM
- Meningkatnya keterampilan teknologi produk bagi Pelaku IKM
- Bertumbuhnya unit industri mikro/industri kecil
- Terlayannya rancangan kemasan bagi produk IKM makanan ringan.

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun rencana Program dan Kegiatan dalam Renja 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 pada Tabel berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	Penyediaan Bahan/Material
--	---------------------------

	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
B	PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah kabupaten
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten
C	PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten
	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten
D	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah kabupaten
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi





E	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
	Pemberdayaan Kelembagaan, Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
F	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
G	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



BAB

IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Adapun jumlah program yang direncanakan untuk tahun 2024 sebanyak 7 Program, 13 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu tetap mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.







**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KOPERASI, UKM DAN
PERINDUSTRIAN TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

**KABUPATEN
LUWU**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	

					Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluara n Sub Kegiata	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
					DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN								4.352.549.441,00					4.477.188.991,00
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								505.369.950,00					615.000.000,00
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI								0,00					50.000.000,00
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								0,00					50.000.000,00
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	Tersedianya Laporan Pengawasan Koperasi	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	300 Unit Usaha	1 dokumen	0,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas	300 Unit Usaha	50.000.000,00



2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pengawasan Koperasi	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	300 Unit Usaha	1 dokumen	0,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Unit Usaha	0,00
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN								241.753.500,00				250.000.000,00
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota								241.753.500,00				250.000.000,00
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase pengurus koperasi yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Cakupan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	50 Orang	100 PERSEN	241.753.500,00	DAK Non Fisik- PK2UK M	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	250.000.000,00
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)								263.616.450,00				315.000.000,00
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan								263.616.450,00				315.000.000,00
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	1 Dokume n	100 Persen	0,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1 Dokumen	45.000.000,00
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro dan Menengah Aktif	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	Cakupan penyelenggaraan Pemberdayaan Usaha Mikro	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	53 Unit Usaha	100 Persen	263.616.450,00	DAK Non Fisik- PK2UK	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha	53 Unit Usaha	270.000.000,00
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								649.990.500,00				665.000.000,00
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								629.704.200,00				640.000.000,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								629.704.200,00				640.000.000,00





3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	Cakupan penyelenggaraan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	1 Dokumen	1 dokumen	499.990.450,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	500.000.000,00
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	Cakupan penyelenggaraan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang disusun	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	1 Dokumen	1 dokumen	129.713.750,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran	1 Dokumen	140.000.000,00
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL								20.286.300,00				25.000.000,00
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota								20.286.300,00				25.000.000,00
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem	Cakupan penyelenggaraan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	Dokumen Informasi Industri (IUI,IPUI,IUKI dan IPKI)	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Persen	1 Dokumen	1 dokumen	20.286.300,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	1 Dokumen	25.000.000,00
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3.197.188.991,00				3.197.188.991,00
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								17.624.050,00				17.624.050,00
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	88 Index	2 Dokumen	11 dokumen	2.366.650,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.366.650,00
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga Selatan	88 Index	1 Dokumen	11 dokumen	1.973.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	1 Dokumen	1.973.000,00





2	17	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	88 Index	1 Dokumen	11 dokumen	1.501.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.501.200,00
2	17	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	88 Index	1 Dokumen	11 dokumen	2.409.900,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.409.900,00
2	17	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	88 Index	1 Dokumen	11 dokumen	2.132.650,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.132.650,00
2	17	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang disusun	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	88 Index	5 Laporan	11 dokumen	7.240.650,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	7.240.650,00
2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2.405.291.600,00					2.405.291.600,00
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	22 Orang/bulan	100 Persen	2.262.485.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	2.262.485.000,00
2	17	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara	- Kab. Luwu, Belopa, Belopa	100 Persen	15 Dokumen	100 Persen	132.300.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	132.300.000,00





2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	4.690.400,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	1 Laporan	4.690.400,00
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	14 Laporan	100 Persen	5.816.200,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	14 Laporan	5.816.200,00
2	17	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								1.730.000,00					1.730.000,00
2	17	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jenis Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	2 Laporan	1 dokumen	1.730.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.730.000,00
2	17	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								49.920.000,00					49.920.000,00
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	undefined undefined d 100	50 Paket	75 Persen	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	0,00
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Persentase ASN dengan predikat kinerja baik	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	undefined undefined d 100	1 Orang	75 Persen	49.920.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	1 Orang	49.920.000,00
2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								303.950.365,00					303.950.365,00





2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	8 Paket	90 Persen	780.000,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	780.000,00
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	22 Paket	90 Persen	5.956.575,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	5.956.575,00
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	6 Paket	90 Persen	4.512.600,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	4.512.600,00
2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	6 Dokume n	90 Persen	10.800.000,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang	6 Dokumen	10.800.000,00
2	17	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	35 Paket	90 Persen	12.556.790,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	35 Paket	12.556.790,00
2	17	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Laporan	90 Persen	7.500.000,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.500.000,00
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan ketersediaan administrasi umum perangkat daerah	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	1 Laporan	90 Persen	261.844.400,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	261.844.400,00
2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								0,00				135.000.000,00





2	17	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	3 Unit	100 Persen	0,00	-		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang	3 Unit	60.000.000,00
2	17	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	5 Unit	100 Persen	0,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	75.000.000,00
2	17	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	- Kab. Luwu, Semua Kecamatan, Semua	100 Persen	1 Unit	100 Persen	0,00	-		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00
2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								362.492.976,00					362.492.976,00
2	17	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	12.000.000,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12.000.000,00
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Laporan	100 Persen	31.892.976,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan	31.892.976,00
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	318.600.000,00	Pendapa tan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	318.600.000,00
2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								56.180.000,00					56.180.000,00





2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	8 Unit	75 Persen	51.640.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	51.640.000,00
2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	10 Unit	75 Persen	4.540.000,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.540.000,00
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	- Kab. Luwu, Belopa, Senga	100 Persen	1 Unit	75 Persen	0,00	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0,00
TOTAL													4.352.549.441,00				4.477.188.991,00	





BAB V

PENUTU

P

Rancangan Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu Tahun 2024 merupakan acuan kinerja dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Luwu sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan program tahunan pemerintah daerah. Secara umum Renja Perangkat Daerah dapat menjawab 2 (dua) hal yang mendasar :

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan yang hendak dicapai dalam
1
(satu) tahun
2. Langkah- langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Objektivitas informasi dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja diperoleh dari konsepsi RKPD Pemerintah

Kabupaten Luwu yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari seluruh potensi yang ada. Dan antisipasi yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan atau meningkatkan kualitas kinerja Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu dimasa yang akan datang adalah melaksanakan Rencana Strategi Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian secara konsisten dan bertanggung jawab.

Sebagai upaya mewujudkan tercapainya Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu maka diperlukan adanya komitmen baik dilingkup Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian Kabupaten Luwu maupun pihak yang terkait. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna pelaksanaan rencana kerja secara optimal.

Kepala Dinas Koperasi, UKM
& Perindustrian Kab. Luwu

R A H I M U L L A H, S E

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip:19660710199303 1 003